

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan kebijakan luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Lee Myung-bak (2008–2013) dan Moon Jae-in (2017–2022) dalam memandang dan merespons isu unifikasi Korea. Dengan menggunakan kerangka teori *Decision-Making Model* dari Snyder dan konsep tahapan unifikasi politik dari Amitai Etzioni (1962), penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan orientasi, aktor, struktur pengambilan keputusan, serta cara memaknai unifikasi antara kedua pemerintahan berdampak signifikan pada kemajuan proses integrasi antar-Korea.

Pada masa pemerintahan Lee Myung-bak, kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara bersifat konfrontatif dan bersyarat. Lee memandang unifikasi sebagai suatu tujuan akhir yang hanya bisa dicapai jika Korea Utara terlebih dahulu melakukan denuklirisasi total, melalui kebijakan yaitu “*Denuclearization, Vision 3000, and Openness*.” Dalam kerangka *Decision-Making Model*, kebijakan ini mencerminkan model pengambilan keputusan yang sentralistik, dan sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal, terutama dari AS. *Internal setting* masa ini didominasi oleh elit konservatif dan kurang adanya partisipasi publik dalam proses formulasi kebijakan.

Dalam kerangka unifikasi Etzioni, pendekatan Lee tidak berhasil melewati tahap awal *Unification Process A*. Heterogenitas politik dan ekonomi antara kedua Korea semakin diperlebar melalui tindakan-tindakan represif seperti pembatasan proyek ekonomi bersama dan penghentian inisiatif dialog. Alih-alih menciptakan momentum awal atau integrasi sektoral, kebijakan Lee memperburuk hubungan lintas batas dan menciptakan regresi dalam hubungan antar-Korea, sehingga tidak ada momentum *take-off* yang tercipta.

Sebaliknya, pada masa pemerintahan Moon Jae-in, kebijakan luar negeri menunjukkan pendekatan yang kooperatif, inklusif, dan normatif, dengan

memandang unifikasi sebagai proses jangka panjang yang harus dibangun melalui dialog, kepercayaan, dan kerja sama sektoral. Moon menolak penggunaan prasyarat seperti denuklirisasi untuk memulai dialog, dan memilih pendekatan berbasis keterlibatan langsung melalui diplomasi tingkat tinggi dan dialog perdamaian. Inisiatif seperti Deklarasi *Panmunjom*, pembentukan kantor penghubung bersama di *Kaesong*, serta pertemuan keluarga terpisah menunjukkan bahwa Moon menempatkan prioritas pada pendekatan manusiawi dan integratif.

Dalam model pengambilan keputusan Snyder, Moon merepresentasikan pola yang lebih adaptif, dengan memperhitungkan aspirasi publik, tekanan kelompok sipil, dan dinamika regional. Struktur internal pemerintahannya lebih terbuka terhadap masukan non-elit, dan keputusan luar negeri cenderung mencerminkan konsensus domestik progresif. Secara eksternal, Moon juga menyeimbangkan antara tekanan diplomatik dari AS dan potensi keterlibatan aktif Tiongkok, dengan tetap menempatkan kepemimpinan Korea Selatan sebagai aktor utama dalam proses reunifikasi.

Dalam perspektif Etzioni, pemerintahan Moon berhasil memasuki tahap *Unification Process A* dan sebagian besar dari *Unification Process B*. Moon menciptakan momentum *take-off* dengan peningkatan aliran komunikasi, barang, dan simbol-simbol kerja sama. Integrasi sektoral pun mulai diperluas, dengan rencana kerja sama infrastruktur lintas batas, revitalisasi kawasan industri *Kaesong*, serta kerja sama budaya dan olahraga (seperti tim gabungan dalam Olimpiade). Fenomena *spill-over* dari satu sektor ke sektor lain menunjukkan bahwa pendekatan Moon memiliki kapasitas untuk memperluas cakupan unifikasi secara progresif, meskipun masih dibatasi oleh sanksi internasional dan hambatan diplomasi Korea Utara-AS.

Secara keseluruhan, perbedaan antara kedua pemerintahan tidak hanya terletak pada strategi teknis, tetapi juga pada cara mendasar dalam memandang unifikasi itu sendiri. Lee memandang unifikasi sebagai proses yang bersifat transaksional dan berbasis syarat struktural, sedangkan Moon melihatnya sebagai proses relasional yang harus dimulai dari pembangunan

kepercayaan, interaksi sosial, dan integrasi kelembagaan bertahap. Dengan kata lain, Lee mengedepankan pendekatan *hard-line conditionality*, sementara Moon menekankan *confidence-building through engagement*.

5.2 Saran

Adanya perbedaan kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah Lee Myung-bak dan Moon Jae-in membuka arah penting untuk penelitian dan rekomendasi kebijakan di masa depan. Peneliti menyarankan untuk mengkaji interaksi kompleks antara faktor domestik dan eksternal dalam pembentukan kebijakan unifikasi. Analisis dapat diperluas dengan memanfaatkan data kualitatif dan kuantitatif yang lebih beragam, seperti survei opini publik dan studi kasus komparatif dari konteks unifikasi lain. Selain itu, penelitian tentang dinamika internal birokrasi dan peran negosiator kunci dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang implementasi kebijakan.

Peneliti melihat Pemerintah Korea Selatan ke depan harus memadukan kekuatan koersif dan normatif secara seimbang, beradaptasi dengan perubahan geopolitik dan kondisi internal Korea Utara. Hal ini penting untuk membangun unifikasi yang kokoh dan secara aktif mengelola hubungan dengan kekuatan regional utama. dengan demikian, akan tercipta lingkungan eksternal yang stabil dan krusial bagi denuklirisasi serta kemajuan unifikasi.